



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **16:04** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.M., Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., Dra. Renny Ariyani, S.H., M.H., LL.M., dan Dra. Indrayati H S., S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2022 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Senin** tanggal **empat** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **08:15** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 64/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.M., Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., Dra. Renny Ariyani, S.H., M.H., LL.M., dan Dra. Indrayati H S., S.H., M.H.

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

No APPP : 64/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
4	Alat Bukti	1	
5	Surat Kuasa	1	
6	Permohonan bertanggal 29 Juni 2022	1 rangkap	Asli. Renvoi pada halaman 1 di bulan (Juni) dan tanggal Surat Kuasa Khusus (21 Juni 2022)
7	Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022	1 rangkap	Asli. Renvoi pada halaman 2
8	KTA dan BAS Kuasa Hukum	1 rangkap	Copy
9	Daftar Alat Bukti tanggal 29 Juni 2022 untuk Bukti P-1 sd P-19	1 rangkap	Asli. Renvoi pada Bukti P-5, Bukti P-15, Bukti P-17, dan Bukti P-18.
10	Bukti P-1 sd P-19	1 rangkap	Asli
11	Surat tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Prioritas Perkara, dan Pelaksanaan Sidang Offline/Luring	1 file (PDF)	Diterima via email MKRI (Jumat, 1 Juli 2022 pukul 14.50 WIB)

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.